

Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hafidah Laila^{1*}, Nunuk Triwahyuningtyas² dan Renea Shinta Aminda³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2 dan 3}

Email: hafidah.laila@upnvj.ac.id¹, nunukwowo@gmail.com² dan renea_shinta@yahoo.com³

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 06-01-2022

Direvisi : 14-01-2022

Disetujui : 24-01-2022

Kata Kunci: kekayaan media; komunikasi; kepemimpinan; pandemi COVID-19

Key Words: media wealth; communication; leadership; COVID-19 pandemic

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, serta pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penarikan sampel dalam riset ini memakai metode sampling jenuh di 5 wilayah sepanjang tahun 2013-2019, sehingga total sampel sebanyak 35 data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Riset ini memakai analisis data panel ialah campuran antara data cross section serta data time series. Hasil riset secara parsial menampilkan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, sementara pengeluaran pemerintah tidak memengaruhi PAD. Hasil riset secara simultan menampilkan bahwa jumlah penduduk, pendapatan per kapita, serta pengeluaran pemerintah memengaruhi PAD.

Abstract

This research aims to determine the effect of population, per capita income, and government spending on Regional Original Income (PAD) in regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The sampling in this study used the saturated sampling method in 5 regions during 2013-2019, so a total sample of 35 data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS). This research uses a data analysis panel that is a mixture of cross section data and time series data. The results of the research partially show that population and per capita income have a significant positive effect on PAD, while government spending does not affect PAD. The research results simultaneously show that population, per capita income, and expenditure affect PAD.

Koresponden author: Hafidah Laila

Email: hafidah.laila@upnvj.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



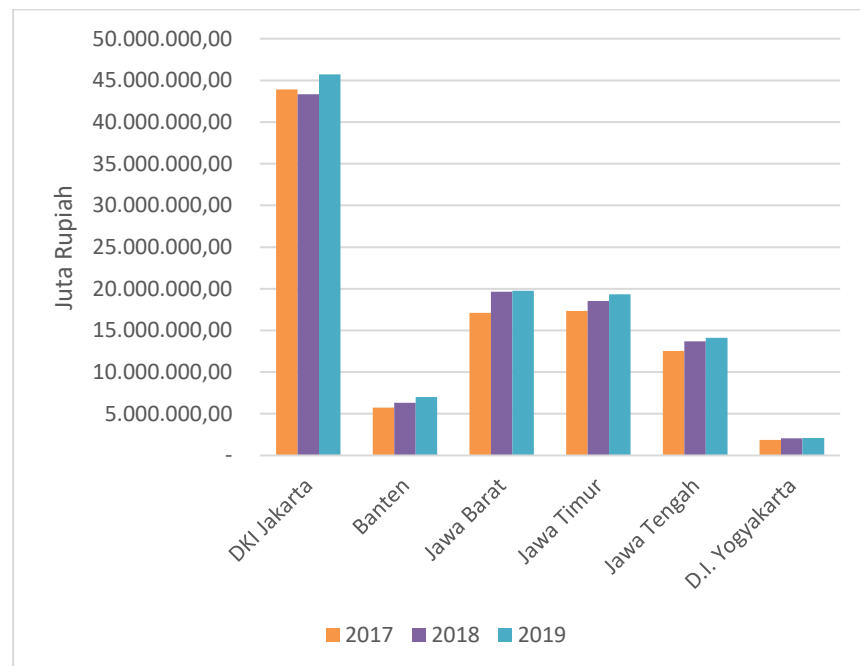
Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota merupakan daerah yang memiliki kewenangan otonomi daerahnya sendiri, artinya daerah tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan daerahnya sendiri agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Berlakunya otonomi daerah ini diharapkan dapat meraih kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik, serta lebih memahami seluruh kebutuhan daerahnya. Bukan hal mudah bagi pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah mesti sanggup menggali sumber-sumber

keuangannya sendiri lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah akan tercipta jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi, sehingga daerah tersebut dikatakan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik (Oktiani & Al Muhariah, 2021).

PAD berperan untuk membiayai kebutuhan wilayah tersebut seperti pembangunan fasilitas publik. Apabila PAD tinggi maka dana yang dipunyai pemerintah daerah buat pembangunan fasilitas publik akan lebih banyak dan taraf kemandirian daerah semakin meningkat pula, sebagai akibatnya pemerintah daerah mempunyai kesempatan tinggi buat membangun perekonomiannya. Kendala muncul apabila suatu daerah memiliki PAD yang rendah, menyebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik karena anggaran daerahnya yang terbatas. Kemandirian daerah juga tidak akan menjadi kenyataan jika pemerintah pusat yang menguasai sebagian besar sumber dana. Hal ini justru akan mematikan inisiatif Pemda dalam menggali dan mengembangkan sumber PAD yang tersedia. Apabila pemerintah pusat yang menguasai sumber dana, maka akan terjadi peningkatan ketergantungan anggaran daerah kepada pusat dan menyebabkan pengawasan yang ketat kepada pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya (Kustiawan, 2006).

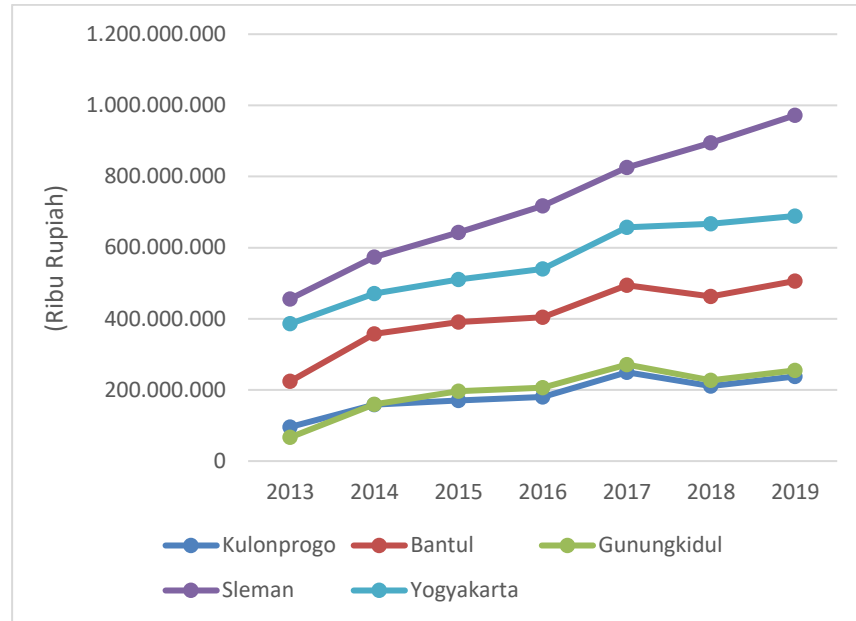
D.I. Yogyakarta ialah salah satu provinsi di Pulau Jawa, ternyata mempunyai PAD terendah dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang terdapat di Pulau Jawa seperti yang terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Realisasi PAD Provinsi di Pulau Jawa, 2017-2019
Sumber: BPS (2020).

Grafik 1 menunjukkan Provinsi DIY hanya memiliki PAD sebesar Rp 2,08 triliun pada tahun 2019, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan lima provinsi lainnya yang memiliki PAD lebih besar. Hal ini dikarenakan wilayah DIY relatif kecil, tidak sebesar provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, akibatnya sumber daya yang dimiliki terbatas. Provinsi DIY lebih mengandalkan sektor tersier yaitu suatu sektor yang lebih menghasilkan jasa dibandingkan dengan produk atau barang seperti sektor pariwisata dan sektor jasa lainnya untuk memperoleh pendapatan daerahnya.

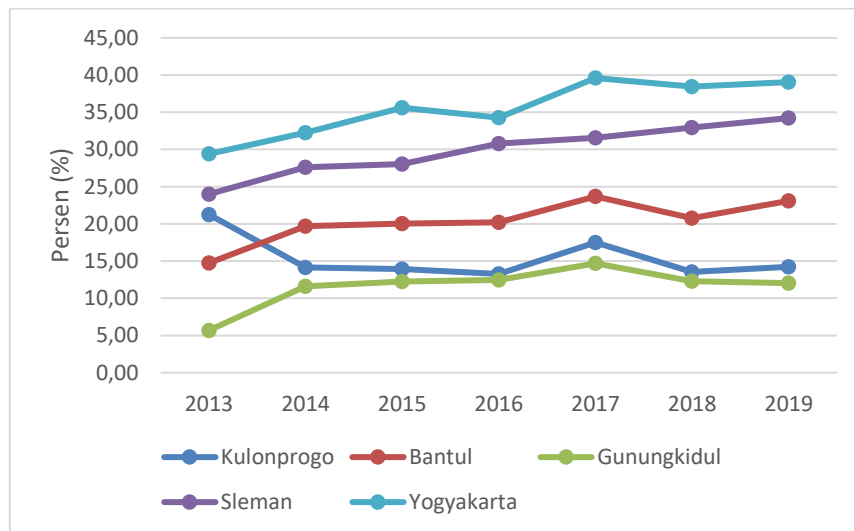
Provinsi DIY terdiri dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, serta Kota Yogyakarta, masing-masing daerah tersebut mempunyai PAD yang berbeda-beda seperti pada grafik berikut:



Gambar 2. Grafik Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2013-2019.
Sumber: BPS (2020).

Dilihat dari grafik 2 bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, sedangkan daerah lain cenderung mengalami peningkatan. Penurunan itu terjadi karena mahalnya tiket pesawat domestik serta adanya isu tsunami ataupun beberapa bencana alam lain seperti banjir, tanah longsor, serta gelombang tinggi, akibatnya kunjungan wisatawan berkurang yang berdampak pada penerimaan PAD.

Pengukuran taraf kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pusat atau dengan kata lain pemerintah daerah akan mampu membiayai keuangan daerahnya sendiri. Di antara kabupaten/kota yang berada di Provinsi DIY, hingga tahun 2019, belum ada kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya yang mencapai 70% seperti yang terlihat pada grafik 3:



Gambar 1. Grafik Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2013-2019.

Sumber: BPS (2020).

Selama kurun waktu 2013-2019, kontribusi PAD tertinggi hanya mencapai 39,60% yaitu di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Hal ini menerangkan bahwa dalam hal pendanaan keuangan daerahnya, Pemda masih bergantung kepada pemerintah pusat sebab dana yang berasal dari PAD tidak cukup besar buat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah.

Musgrave (1993) mengatakan tinggi rendahnya penerimaan PAD dapat bergantung pada banyaknya penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah. Jumlah penduduk mencerminkan jumlah penyeter pajak daerah, artinya penduduk yang banyak maka semakin banyak pula pajak daerah yang dibayarkan sehingga berdampak pada penerimaan PAD yang bertambah. Provinsi DIY memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan semakin bertambah tiap tahunnya, meskipun bukan yang terbesar di Pulau Jawa karena DIY memiliki wilayah yang relatif kecil.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2016-2019

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	416	421	425	430
Bantul	983	995	1.006	1.018
Gunungkidul	722	729	736	742
Sleman	1.180	1.193	1.206	1.219
Yogyakarta	417	422	427	431

Sumber: BPS (2020).

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya karena Provinsi DIY terus menerus mengalami proses modernisasi sehingga menjadi faktor penggerak perubahan, penarik arus urbanisasi, dan migrasi penduduk. Banyaknya penduduk ini tidak selalu menambah penerimaan PAD seperti yang terjadi di 3 kabupaten (Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul) pada tahun 2018 di mana jumlah penduduk bertambah sedangkan PAD menurun. Keadaan ini disebabkan banyaknya penduduk yang tidak produktif karena sulit mencari lapangan pekerjaan, sehingga banyak penduduk yang tidak mampu membayar

berbagai pungutan pemerintah (Hakib dkk, 2020).

Kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar pungutan pemerintah dapat diukur dengan melihat pendapatan per kapitanya, sehingga tingginya pendapatan per kapita akan berdampak pada peningkatan penerimaan PAD. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, DIY memiliki pendapatan per kapita terendah. Meskipun begitu, pendapatan per kapita masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY terus meningkat seperti yang terlihat pada tabel 2:

Tabel 2. Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2016-2019

Kab/Kota	<i>(Ribu Rupiah)</i>			
	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	15.793	16.552	18.155	20.391
Bantul	16.650	17.292	18.030	18.809
Gunungkidul	16.189	16.839	17.542	18.315
Sleman	25.043	26.092	27.462	28.935
Yogyakarta	56.341	58.591	61.120	64.095

Sumber: BPS (2020).

Pendapatan per kapita antardaerah memang mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pendapatan per kapita yang tinggi tidak selalu meningkatkan penerimaan PAD seperti yang terjadi pada tahun 2018 di 3 kabupaten (Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul) di mana pendapatan per kapita meningkat sedangkan PAD menurun. Hal ini disebabkan masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak mempunyai pendapatan dan berdampak pada penerimaan PAD. Ada pula ketimpangan pendapatan antardaerah seperti Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki ketimpangan cukup signifikan. Ketimpangan terjadi karena perbedaan kandungan sumberdaya alam di masing-masing daerah sehingga memengaruhi kegiatan produksi di daerah bersangkutan.

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari, masyarakat membutuhkan barang atau fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk penyediaan barang publik akan menimbulkan pungutan yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat berupa pajak dan retribusi dan akhirnya berdampak pada penerimaan PAD yang bertambah. Kabupaten/kota di Provinsi DIY mempunyai pengeluaran pemerintah daerah yang cukup besar. Besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota DIY terlihat pada tabel 3:

Tabel 1. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2016-2019

Kab/Kota	<i>(Miliar Rupiah)</i>			
	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	1.388,6	1.430,5	1.481,0	1.673,0
Bantul	2.016,5	2.076,7	2.165,7	2.278,2
Gunungkidul	1.651,6	1.860,2	1.772,9	2.132,2
Sleman	2.455,4	2.489,6	2.580,1	2.777,0
Yogyakarta	1.665,4	1.484,9	1.652,7	1.734,5

Sumber: BPS (2020).

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2017 Kota Yogyakarta berhasil menekan pengeluaran pemerintah sehingga mengalami penurunan yang tadinya sejumlah Rp 1,6 triliun menjadi Rp 1,4 triliun yang disebabkan adanya pengurangan belanja pegawai yang cukup signifikan sebesar Rp 181,8 miliar, sedangkan penerimaan PAD pada tahun yang sama justru mengalami peningkatan. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu meningkatkan penerimaan PAD dikarenakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat publik cenderung kecil dibandingkan program lain seperti pengeluaran buat pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak berdampak pada penerimaan PAD (Hastuti dkk, 2016).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD seperti penelitian dari Igir dkk (2018), Suherlan (2016), Hakib dkk (2020), Zein (2018), Idrus & Irma (2017), Ariyani dkk (2018), Sudirman & Susilawati (2019), Doni (2018), Rahmad dkk (2019), Raja & Hasugian (2018), serta Triyanto dkk (2017) menyatakan variabel-variabel independen yang dipakai memengaruhi variabel dependen, yaitu PAD. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode Penelitian

Definisi operasional merupakan penafsiran variabel (yang dipaparkan dalam definisi konsep), baik secara operasional, praktik, maupun nyata dalam lingkup objek/riset yang diteliti. Berikut definisi operasional dalam riset ini:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi
PAD (Y)	Seluruh penerimaan yang asalnya dari sumber ekonomi asli daerah.
Jumlah Penduduk (X ₁)	Jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah.
Pendapatan Per Kapita (X ₂)	Pendapatan rata-rata semua penduduk di daerah selama periode tertentu.
Pengeluaran Pemerintah (X ₃)	Belanja pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi, serta ke atas jasa-jasa.

Sumber: Data diolah.

Populasi dan Sampel

Riset ini menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, serta pengeluaran pemerintah terhadap PAD dengan populasi pada 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY yang meliputi 4 kabupaten ialah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Gunungkidul dan 1 kota ialah Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam riset ini memakai *non probability sampling*, dengan metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh ialah metode penentuan sampel jika seluruh anggota populasi dipakai selaku sampel. Riset ini mengambil data pada 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2013-2019, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 35 data.

Jenis dan Sumber Data

Riset ini memakai data sekunder yang didapat lewat data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah jumlah penduduk, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah, serta PAD yang tersusun dari tahun 2013-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Riset ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi ialah teknik yang dilaksanakan dengan membuat salinan data jumlah penduduk, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah, dan PAD agar dapat diolah, dan dengan cara studi pustaka ialah

dengan mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai referensi atau pedoman penelitian.

Teknik Analisis Data

Riset ini memakai analisis data panel di mana data panel ialah campuran antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* ialah data yang didapat dari 1 waktu dengan banyak individu, sebaliknya *time series* ialah data yang didapat dari waktu ke waktu dengan 1 individu. Persamaan regresi data panel ialah (Ghozali & Ratmono, 2014):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \tag{1}$$

Di mana:

- Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien garis regresi
- X_1 = Jumlah Penduduk
- X_2 = Pendapatan Per Kapita
- X_3 = Pengeluaran Pemerintah
- i = *Cross Section*
- t = *Time Series*
- ϵ = *Error*/variabel pengganggu

Ghozali & Ratmono (2014) menerangkan dalam mengestimasi model regresi memakai data panel terdiri dari beberapa cara ialah *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Penentuan model terbaik di antara ketiganya, digunakan 2 uji ialah uji Chow dan uji Hausman. Selanjutnya dilakukan uji Hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil dan Pembahasan

Penentuan model terbaik antara *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* digunakan 2 uji (uji Chow dan uji Hausman). Hasil uji Chow dan uji Hausman diperoleh sebagaimana berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Uji	Prob.	Kesimpulan
Uji Chow	0,0000	<i>Fixed effect</i>
Uji Hausman	0,0017	<i>Fixed effect</i>

Sumber: *Output Eviews*

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman didapatkan model terbaik ialah *fixed effect*. Hasil estimasi *fixed effect* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect

<i>Dependent Variable: PAD</i>			
<i>Method: Panel Least Squares</i>			
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-2,83E+09	-4,403557	0,0002
PDDK	3896837	3,833100	0,0007
PKP	12463,27	3,085980	0,0046
PP	0,008634	0,129703	0,8978

Sumber: *Output Eviews*

Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan persamaan regresi sebagaimana berikut:

$$PAD = -2830000000 + 3896837PDDK + 12463,27PKP + 0,008634PP$$

Persamaan regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Konstanta sejumlah -2830000000 berarti jika variabel bebas nilainya 0, maka PAD sejumlah -2830000000.
2. Koefisien regresi jumlah penduduk sejumlah 3896837 berarti jika jumlah penduduk bertambah sejumlah 1, maka PAD meningkat sejumlah 3896837.
3. Koefisien regresi pendapatan per kapita sejumlah 12463,27 berarti jika pendapatan per kapita bertambah sejumlah 1, maka PAD meningkat sejumlah 12463,27.
4. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah sejumlah 0,008634 berarti jika pengeluaran pemerintah bertambah sejumlah 1, maka PAD meningkat sejumlah 0,008634.

Setelah didapatkan model regresi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis pertama ialah uji t. Uji t dipakai buat menampilkan sejauh mana variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Tolak H_0 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas $< \alpha = 5\%$, artinya variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji T

<i>Dependent Variable: PAD</i>		
<i>Method: Panel Least Squares</i>		
<i>Variable</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-4,403557	0,0002
PDDK	3,833100	0,0007
PKP	3,085980	0,0046
PP	0,129703	0,8978

Sumber: *Output Eviews*

Pada penelitian ini, nilai $df = n - k$ yang dihasilkan sebesar $df = 35 - 3 = 32$ dan signifikansi 0,05 sehingga didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 2,03693, maka:

1. Jumlah penduduk memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,83310 > 2,03693$) dan probabilitas $0,0007 < 0,05$ menandakan secara statistik H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Pendapatan per kapita memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,08598 > 2,03693$) dan probabilitas $0,0046 < 0,05$ menandakan secara statistik H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3. Pengeluaran pemerintah memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,12970 < 2,03693$) dan probabilitas $0,8978 > 0,05$ menandakan secara statistik H_0 diterima sehingga dapat dikatakan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Selanjutnya, uji F dipakai buat mengukur seberapa jauh variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $F_{\alpha}(k-1, n-k)$ dan probabilitas $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak. Artinya, variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai F_{tabel} ($df_1=2, df_2=32$) diperoleh sebesar 3,29, dengan demikian nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($156,7478 > 3,29$) dan probabilitas $0,0000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah secara simultan memengaruhi PAD.

Terakhir, koefisien determinasi (*adjusted R²*) dipakai buat mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *adjusted R²* diperoleh sejumlah 0,969757 yang menandakan bahwa variabel dependen (PAD) dapat diterangkan oleh variabel independen (jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah) sejumlah 96,97% sedangkan sisanya 3,02% PAD diterangkan oleh variabel atau sebab lainnya.

1. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Berdasarkan hasil, jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap PAD, sehingga dapat diartikan bahwa jumlah penduduk yang bertambah akan semakin menaikkan penerimaan PAD. Hasil riset ini dapat ditunjukkan pada salah satu data sampel yaitu Kabupaten Sleman tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan PAD, 2017-2018

Kab/Kota	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	PAD (Ribuan Rupiah)
Sleman	2017	1.194	825.637.752
	2018	1.207	894.272.962

Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan tabel 9, dapat dijelaskan bahwa tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebesar 1,19 juta jiwa, sedangkan tahun 2018 sebesar 1,2 juta jiwa yang berarti jumlah penduduk mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada data PAD di Kabupaten Sleman yang mengalami peningkatan di mana PAD tahun 2017 sebesar Rp 825,63 miliar, sedangkan PAD tahun 2018 sebesar Rp 894,27 miliar. Hal ini dapat disimpulkan bila jumlah penduduk naik, maka PAD juga naik. Hasil riset ini didukung oleh teori Musgrave (1993) yang mengatakan jumlah penduduk mencerminkan jumlah penyeter pajak sehingga banyaknya penduduk akan menaikkan jumlah pajak yang disetorkan kepada pemerintah daerah, di mana pajak ialah salah satu penyumbang utama PAD. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Idrus & Irma (2017), Ariyani dkk (2018), Sudirman & Susilawati (2019), serta Rahmad dkk (2019) yang menyatakan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap PAD. Terdapat pula penelitian lain yang tidak searah dengan hasil penelitian ini yakni Hakib dkk (2020), Zein (2018), Doni (2018), serta Raja & Hasugian (2018) yang menyatakan jumlah penduduk tidak memengaruhi PAD dikarenakan penduduk yang bertambah justru akan memperlambat pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh masyarakat, justru akan dihabiskan untuk memberi makan anak-anak mereka sehingga tabungan yang sudah rendah akan semakin rendah yang mengakibatkan investasi juga rendah.

2. Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap PAD

Berdasarkan hasil, pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap PAD, sehingga dapat diartikan bahwa pendapatan per kapita yang tinggi akan meningkatkan penerimaan PAD. Hasil penelitian ini tercermin pada salah satu data sampel di Kota Yogyakarta tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 9. Pendapatan Per Kapita dan PAD, 2017-2018

Kab/Kota	Tahun	Pendapatan Per Kapita (Ribuan Rupiah)	PAD (Ribuan Rupiah)
Yogyakarta	2017	58.591	657.049.370
	2018	61.120	667.493.080

Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa pendapatan per kapita Kota Yogyakarta tahun 2017 sebesar Rp 58,59 juta, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 61,12 juta yang berarti pendapatan per kapita mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada data PAD Kota Yogyakarta yang mengalami peningkatan di mana PAD tahun 2017 sebesar Rp 657,04 miliar, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 667,49 miliar. Hal ini dapat disimpulkan apabila pendapatan per kapita meningkat maka PAD juga meningkat. Hasil riset ini didukung teori

Musgrave (1993) bahwa semakin besarnya pendapatan per kapita masyarakat di suatu daerah, maka masyarakat daerah tersebut akan mampu untuk membiayai pengeluaran rutin yang ditetapkan oleh pemerintah berupa pajak dan retribusi. Hasil riset ini sesuai dengan riset dari Suherlan (2016) dengan hasil pendapatan per kapita mempunyai pengaruh terhadap PAD karena pendapatan per kapita merupakan gambaran dari kesejahteraan penduduk di daerah. Ada pula penelitian yang bertentangan dengan penelitian dari Igir dkk (2018) dengan hasil bahwa pendapatan per kapita tidak memengaruhi PAD karena pendapatan rata-rata penduduk setiap tahunnya yang tidak merata atau dengan kata lain terjadi ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan membayar antara kelompok berpendapatan rendah dengan kelompok berpendapatan tinggi, baik dalam hal membayar pajak maupun retribusi daerah.

3. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD

Berdasarkan hasil, pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD, sehingga tinggi rendahnya pengeluaran pemerintah tidak memengaruhi penerimaan PAD. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana publik tidak dapat dirasakan secara langsung oleh penduduk sebab pemerintah dalam mengalokasikan dananya tidak dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga tidak memengaruhi penerimaan PAD. Hal tersebut tercermin dalam salah satu data sampel di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul pada tahun 2017-2018:

Tabel 10. Pengeluaran Pemerintah dan PAD, 2017-2018

Kab/ Kota	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)	PAD (Ribu Rupiah)
Kulon Progo	2017	1.430.456.004	249.692.649
	2018	1.481.008.330	211.047.699
Bantul	2017	2.076.742.163	494.179.068
	2018	2.165.651.760	462.653.960

Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan data, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang tadinya sejumlah Rp 1,43 triliun tahun 2017 menjadi Rp 1,48 triliun tahun 2018, namun pada waktu yang sama PAD Kabupaten Kulon Progo justru mengalami penurunan yang tadinya sebesar Rp 249,69 miliar tahun 2017 menjadi Rp 211,04 miliar tahun 2018. Hal serupa terjadi pada Kabupaten Bantul di mana pengeluaran pemerintah tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yang tadinya Rp 2,07 triliun menjadi Rp 2,16 triliun, namun pada waktu yang sama PAD justru mengalami penurunan yang tadinya Rp 494,17 miliar menjadi Rp 462,65 miliar. Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat tersebut menyebabkan pengalokasian dana menjadi tidak efektif dan efisien, akibatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berdampak pada berkurangnya penerimaan PAD yang diperoleh pemerintah. Hasil riset ini relevan dengan riset Idrus & Irma (2017) dan Hastuti dkk (2016) yang membuktikan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk program pemerintah yang bersifat publik lebih kecil dibandingkan dengan program lainnya seperti pengadaan sarana kesehatan dan pendidikan, sehingga penerimaan PAD yang dipungut dari pajak dan retribusi tidak terlalu besar jumlahnya. Penyebab lainnya adalah karena pengeluaran pemerintah asalnya dari pendapatan daerah itu sendiri, sehingga mengurangi penerimaan PAD. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Doni (2018), Hakib dkk (2020), Igir dkk (2018), Sudirman & Susilawati (2019), serta Zein (2018) yang mengatakan bahwa pengeluaran

pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, artinya jumlah penduduk yang bertambah akan meningkatkan penerimaan PAD karena jumlah penduduk merupakan gambaran dari banyaknya penyetor pajak. Penduduk yang merupakan input potensial karena dapat mendorong pembangunan ekonomi menjadi lebih baik dengan berpartisipasi sebagai tenaga kerja, sehingga untuk memberikan pengaruhnya terhadap PAD, penduduk harus selalu produktif dengan bekerja agar memperoleh pendapatan sehingga mereka sanggup membayar pajak dan retribusi yang nantinya akan berdampak pada penerimaan PAD yang bertambah. Pendapatan per kapita berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, artinya pendapatan per kapita yang tinggi akan menaikkan PAD karena pendapatan per kapita merupakan gambaran dari pendapatan yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan akan mampu membayar berbagai pungutan pemerintah, namun pendistribusian pendapatan kepada masyarakat ini harus dilakukan secara merata dikarenakan apabila suatu daerah terdapat ketimpangan pendapatan justru akan mengakibatkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan. Hasil riset menunjukkan pengeluaran pemerintah tidak memengaruhi PAD. Ada beberapa hal yang mengakibatkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh. Pertama, pengeluaran pemerintah yang terus bertambah menyebabkan pengalokasi anggaran menjadi tidak efisien dan efektif yang ditandai dengan pengeluaran pemerintah bertambah sedangkan PAD menurun. Kedua, pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk program yang bersifat publik cenderung lebih kecil dibandingkan program lainnya. Ketiga, pengeluaran pemerintah bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri sehingga mengurangi PAD. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien dengan membuat formulasi model RAPBD dan proyeksi alokasi APBD sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PAD. Saran lain yang bisa diberikan untuk Pemerintah Daerah sebaiknya perlu mengoptimalkan penerimaan PAD dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi besar kecilnya penerimaan PAD seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah.

Bibliografi

- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69.
- Doni, F. U. (2018). Analysis of Influencing Factors Regional Original Revenue (PAD) in The Provincial Government of Dki Jakarta. *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management*, 1(1).
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2014). Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakib, A., Arifin, A., & Rahman, Z. (2020). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah MAMINASATA. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 290–300.
- Hastuti, D., Kadarisman, E., & Rohman, A. A. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 1240–1254.
- Idrus, M. I., & Irma. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 1–15.
- Igir, A. F., Kalangi, J. B., & Kawung, G. M. V. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(6).
- Kustiawan, M. (2006). Pengaruh Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Daerah (Survey pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 3(1), 6.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1993). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Penerbit Erlangga.
- Oktiani, A., & Al Muhariah, N. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *KLASSEN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 16–36.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. Princeton University Press.
- Rahmad, Zulham, T., & Seftarita, C. (2019). The Analysis of Local Revenues and The Affecting Factors in The Implementation of Regional Autonomy in Aceh Province. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 87–103.
- Raja, T. H. L., & Hasugian, P. R. T. (2018). Influence Product Domestic Regional Bruto

(PDRB), Total Population, And Capital Expenditures On Pad (Regional Generated Revenue)(A Case Study In District And Towns In North Sumatera Province). *Advances in Social Sciences Research Journal*, 5(1).

Sudirman, & Susilawati. (2019). Effect of Regional Expenditures, Population and PDRB (ADHB) Against the Original Revenue of Jambi Province. *International Conference on Economics, Management, and Accounting, KnE Social Sciences*, 93–100. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5361>

Suherlan, H. (2016). Kontribusi Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 1(1), 78–96.

Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study In East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.

Zein, A. S. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 6(1), 1–14.